

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung. Refika Aditama. 2018.
- Ahmadi Wiratni, dkk, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Logoz Publishing, Bandung, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Anad, Ghasanam. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media Grup. Jakarta. 2018.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 1994.
- Arrasjid, Chairul. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004.
- Asshidiqie, Jimly. *Negara Hukum Indonesia*. Universitas Jayabaya Press. Jakarta. 2010.
- Bambang, Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2015.
- \_\_\_\_\_. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2019.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Efendi, A'an, Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh. *Teori Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2016.

- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Pustaka Kartini. Jakarta. 1993.
- Heriyanti. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana*. Yuma Pustaka. 2016.
- HS, Salim dan Ellis Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. cetakan ketiga: Raja Grafindo Indonesia. Jakarta. 2014.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Malang. 2005.
- Jaifurrachman, dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2011.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cetakan Kedua. PT. Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta. 2011.
- Mamudji, Sri. Dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. 1 : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia. Jakarta. 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Cet 6). Kencana. Jakarta. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Teori Hukum*. Cetakan keenam : Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2012.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Citra Aditya. Jakarta. 2007.
- Mulyadi Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, dan Praktik)*. PT Alumni. Bandung. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, dan Praktik)*. PT Alumni. Bandung. 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Cet. Kedua : Jakarta. 1993.
- Projodikoro Wiryono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2003.

- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers. Jakarta. 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pers. Jakarta. 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2014.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. 1991.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Alfabeta. Bandung. 2012.
- Tedjasaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bigraf Publishing. Yogyakarta. 1995.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga. Jakarta. 1999.

## **B. Jurnal**

- Bagus, Gede Ardhiarta Prabawa. “Analisis Yuridis tentang Hak Ingkar Notaris dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris”. *Jurnal Acta Comitas*, Volume 1, Nomor 98-11 Tahun 2016-2017.
- Dimas Agung Prastomo. “Akibat Hukum Akta di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris”. *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4 Desember, 2027.
- Hilda Sophia Wiradiredia. “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP”. *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 32 No. 1, 2015.

Kusuma Panji Bima, “Tindak Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Analogi Hukum Universitas Padjajaran*, Vol. 6, No. 8, 2021.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. *Jurnal Imu Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2020.

Shahananda Selly. “Penegakan Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang terlibat Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020”. *Jurnal Indonesian Notary*, Volume 3 Nomor 3, 2021.

Tedjosaputro Liliana, “Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 2, Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 2016.

Marsudi Utoyo, Kinara Afriani, dan Rusmini, “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 1, Desember 2020.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris.



Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

